

MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH SEBAGAI BASIS KUALITAS PENDIDIKAN

Disajikan Untuk :



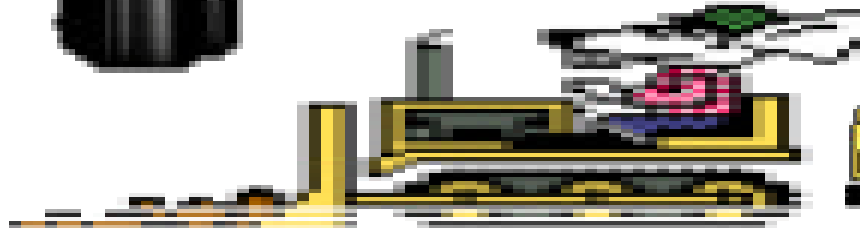
**Oleh :
Dr. Indra Bastian, MBA., Akt**

2007

LATAR BELAKANG

Peranan pengelolaan sumberdaya merupakan suatu kunci pengembangan lembaga

- Untuk lembaga pendidikan, pengelolaan barang, jasa dan uang merupakan penentu kualitas pelayanan



**ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA SEKOLAH
DALAM KEGIATAN MBS SECARA GLOBAL
PERIODE TH. 1999 ¼ 2002**

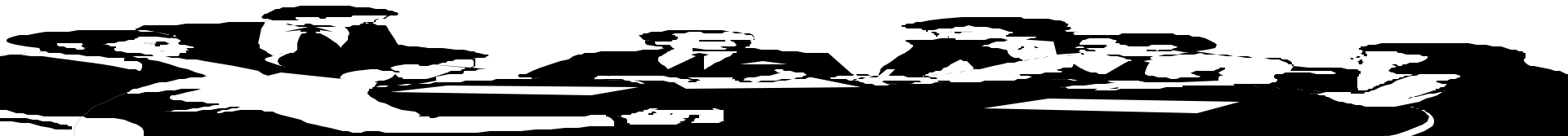
ANGGARAN PENDAPATAN		ANGGARAN BELANJA	
URAIAN	JUMLAH Rp	URAIAN	JUMLAH Rp
1. D.P. 3 (3 Th)	2.000.000,-	I BELANJA PEMERINTAH	
2. PBO 3 Th	6.000.000,-	1. Gaji & gaji seragam	14.500.000,-
3. DOP 3 Th	4.000.000,-	2. UG Gaji & gaji seragam	1.000.000,-
4. Infom. jurnalistik	800.000,-	3. UG Stagen & seragam	600.000,-
5. PACTS	1.000.000,-	II K. D. M.	
6. Bantuan Komite Sekolah	1.000.000,-	1. Pembelian alat & seragam	6.000.000,-
7. Bantuan Ubi. Harat No. 11	100.000,-	2. Buku & seragam	3.420.000,-
8. Bantuan Koperasi	10.000.000,-	3. Bantuan program KDM	2.820.000,-
9. Biaya Ubi. Harat No. 11	1.100.000,-	4. Bantuan seragam KDM	1.000.000,-
10. Bantuan Ubi. Harat No. 11	5.000.000,-	III PENGALIAN SEKOLAH	
11. Biaya Ubi. Harat No. 11	600.000,-	1. Ubi. Harat / kelas	1.100.000,-
12. Bantuan Ubi. Harat No. 11	150.000,-	2. Ubi. Harat / kelas	1.600.000,-
13. Bantuan Ubi. Harat No. 11	1.000.000,-	3. Ubi. Harat / kelas	3.750.000,-
14. Biaya Ubi. Harat No. 11	700.000,-	4. Ubi. Harat / kelas	3.900.000,-
15. Bantuan Ubi. Harat No. 11	1.500.000,-	5. Ubi. Harat / kelas	1.300.000,-
16. D. K. M.	1.700.000,-	6. Ubi. Harat / kelas	2.100.000,-
17. D. K. G.	3.000.000,-	7. Ubi. Harat / kelas	1.400.000,-
		8. Ubi. Harat / kelas	2.400.000,-
		9. Ubi. Harat / kelas	1.040.000,-
		IV PLAN SERTA BERSAMA	
		1. Kapal Ubi. Harat / kelas	100.000,-
		2. Kapal Ubi. Harat / kelas	1.000.000,-
		3. Kapal Ubi. Harat / kelas	1.000.000,-
		V PENGANTARAN	
		1. Ubi. Harat / kelas	1.000.000,-

Perubahan Tuntutan Manajemen Keuangan Pendidikan

- Dalam skala mikro, manajemen keuangan dapat meningkatkan nilai organisasi.
- Namun, di skala makro, manajemen keuangan mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara.
- Manajemen keuangan pendidikan tidak hanya membahas mengenai sumber dana yang diperoleh dan digunakan untuk proses pendidikan, namun, juga membahas mengenai berbagai persoalan (resiko) yang terkait dengan pengelolaan keuangan, serta berbagai upaya untuk mencari sumber-sumber pendanaan untuk kelangsungan organisasi.

Perkembangan Perspektif Manajemen Keuangan Pendidikan (Sekolah)

- Selama tiga dasawarsa terakhir, dunia pendidikan Indonesia secara kuantitatif telah berkembang sangat cepat.
- Pada tahun 1965, jumlah sekolah dasar (SD) sebanyak 53.233 sekolah dengan jumlah murid dan guru sebesar 11.577.943 murid dan 274.545 guru, telah meningkat pesat menjadi 150.921 SD dan 25.667.578 murid serta 1.158.004 guru (Pusat Informatika, Balitbang Depdikbud, 1999).
- Dalam waktu sekitar 30 tahun, jumlah SD naik sekitar 300%.
- Hal ini patut disyukuri....
- Namun di sisi lain, perkembangan pendidikan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan yang sepadan.
- Saat yang sama, aspek – aspek pendukung pendidikan seperti manajemen keuangan pendidikan, belum cukup serius dikembangkan.



Bagan 1: Perkembangan Perspektif dalam Manajemen Keuangan Pendidikan

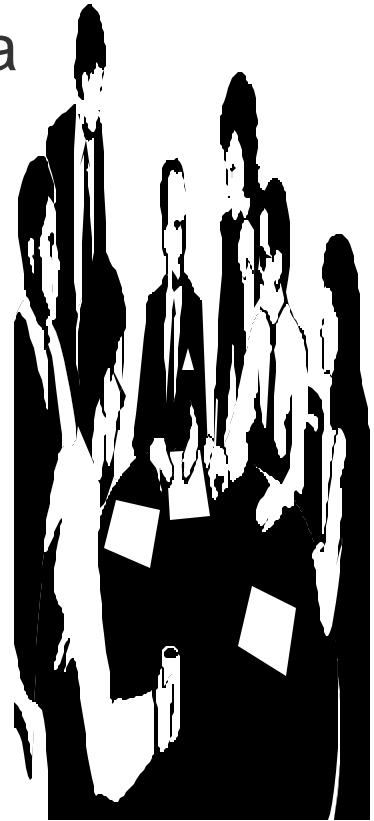


Dalam perspektif politik, sebelum berlakunya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sistem pendidikan nasional mengacu pada UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pendanaan tidak diatur secara khusus. Namun, dalam UU No. 20 tahun 2003, Pendanaan Pendidikan sudah diatur secara khusus dalam Bab XIII, substansinya antara lain:

- Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- Pengalokasian dana pendidikan.

Perkembangan Perspektif Manajemen Keuangan Pendidikan (Sekolah)

- Namun, secara teknis, petunjuk teknis tentang manajemen keuangan pendidikan, khususnya tentang pelaporan keuangan, belum diatur secara khusus. Peran masyarakat dalam mendukung serta mengontrol manajemen keuangan pendidikan, belum jelas.
- Di samping itu, standar pembiayaan dalam PP No. 19 tahun 2005 mengatur hanya elemen biaya, tanpa petunjuk perhitungan kos pendidikan. Disinilah, pendekatan terpadu dalam pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia, baik dari regulator, pengawas, evaluator, dan operator, perlu dilakukan.



Tujuan Manajemen Keuangan Pendidikan

- Dalam perspektif administrasi publik, tujuan manajemen keuangan pendidikan adalah membantu pengelolaan sumber keuangan organisasi pendidikan serta menciptakan mekanisme pengendalian yang tepat, bagi pengambilan keputusan keuangan yang dalam pencapaian tujuan organisasi pendidikan yang transparan, akuntabel dan efektif.
- Pengendalian yang baik terhadap administrasi manajemen keuangan pendidikan akan memberikan pertanggungjawaban sosial yang baik kepada berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).





MEMECAHKAN PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

**KOMITE
SEKOLAH**

PEMERINTAH

MASYARAKAT

Dalam perspektif akuntansi, setiap kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan, terutama mengenai penerimaan dana pengeluaran keuangan sekolah kepada Komite Sekolah dan pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi keuangan diberlakukan sebagai kriteria pelaporan yang disajikan bagi pihak pengelola sekolah. Hal ini akan menjamin akuntabilitas publik, khususnya bagi pengguna jasa pendidikan.

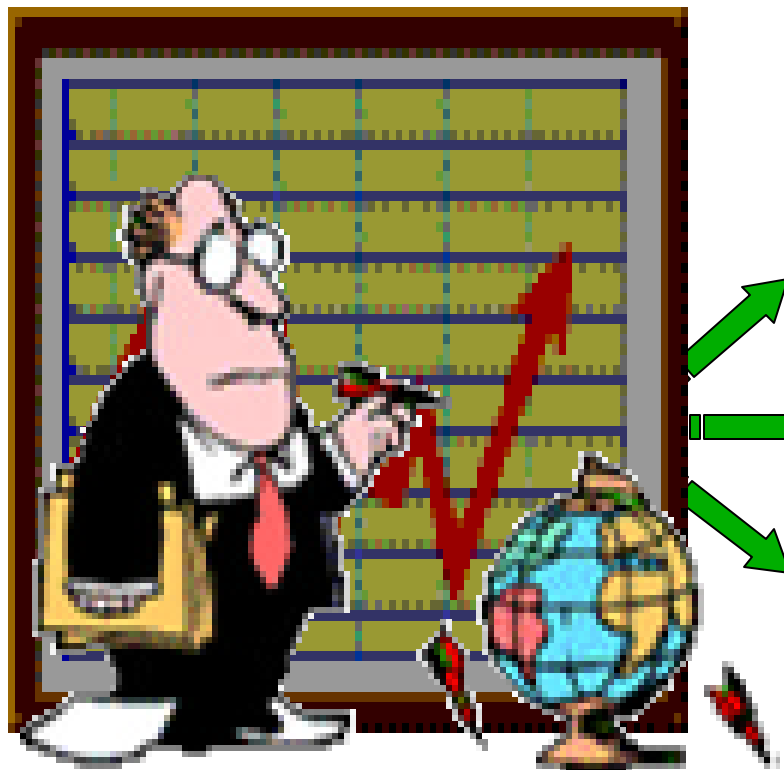
**ARAH PENGEMBANGAN
MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN
DI INDONESIA**

Siklus Manajemen Keuangan Pendidikan

Dalam Perspektif Akuntansi, meliputi :



Dilihat dari perspektif akuntansi, peran manajemen keuangan pendidikan adalah sebagai berikut:



Melakukan analisis setiap keputusan dari aspek keuangan pendidikan

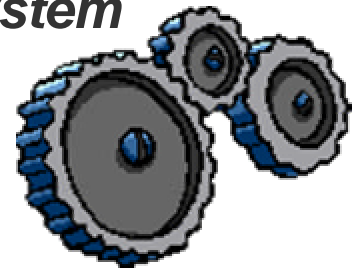
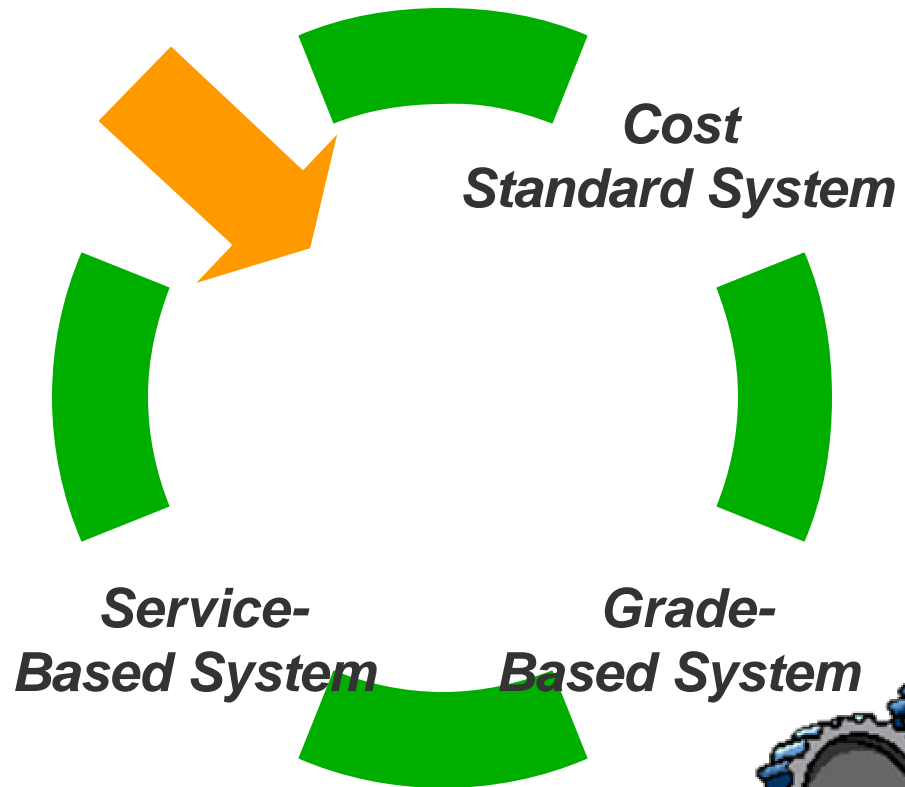
Melakukan analisis pendanaan untuk kepentingan investasi

Melakukan analisis biaya terkait dengan penentuan *cost* jasa pendidikan

Melakukan analisis arus kas operasi pendidikan

PERAN MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN

Penerapan Perspektif Akuntansi Dalam Pengelolaan Biaya Pendidikan Menuju KUALITAS KOMUNITAS SEKOLAH



1. Cost Standard System



Sistem *School Based Cost Accounting System* (SBCAS) didasarkan pada *standar costing unit* (unit biaya standar), dimana setiap sekolah dapat menggunakannya untuk mengukur seluruh biayanya. SBCAS digunakan oleh siswa sebagai dasar penghitungan biaya unit.

Untuk menghitung rata-rata biaya siswa setiap sekolah, SBCAS mengumpulkan biaya langsung (*direct costs*) dari *school-based cost report* (SBCR), seperti terlihat pada **tampilan 1**

Tampilan 1 Laporan Biaya Sekolah (*school-based cost report*), 1985-86

Statistik :

Jumlah siswa yang terdaftar	750
Jumlah hari dalam tahun akademik	170
Jumlah hari potensial siswa	127,500
Jumlah hari sesungguhnya	115,350
Persentase kedatangan (<i>attendance rate</i>)	90.5%

Biaya langsung-Instruksi

Gaji guru umum	Rp 1,175,000
Gaji guru pendidikan khusus	480,000
Gaji pembantu (<i>Aide</i>)	58,500
Gaji guru pengganti	37,700
Perlengkapan belajar dan perpustakaan	85,200
Jasa lain*	327,500

Jumlah

Rp2,163,900

Biaya langsung-administrasi

Gaji administrative	Rp 125,000
Perlengkapan administrative	15,500
Operasi dan peralatan	270,000
Lainnya	7,500

Jumlah

418,000

Jumlah biaya langsung

Rp2,581,900

Biaya tidak langsung-alokasi dari kantor pusat

Komite sekolah	Rp 3,500
Administrasi	43,300
Asuransi jiwa dan kesehatan	135,200
Operasi dan peralatan	7,400
Sewa dan depresiasi	3,500
Jasa kontrak	2,200
Travel	850

Jumlah

195,950

Jumlah biaya langsung dan tidak langsung

Rp2,777,850

Rata-rata biaya siswa yang terdaftar

Rp 3,704

- Termasuk atletik, transportasi, dan konsultasi

2. *Grade Based-System*

Sistem baru ini menetapkan siswa sebagai *standard costing unit*

↓ pendekatan ini lebih akurat

↓ Untuk mengevaluasi sistem akuntansi biaya ini, pengelola mencari perbedaan penghitungan biaya yang dihasilkan dari dua sistem tersebut

↓ Perbedaan biaya per siswa dihasilkan dengan prosedur akuntansi yang berbeda




Dari temuan ini, sistem “*grade-based*” meningkatkan kemampuan kepala sekolah untuk menganggarkan dan mengontrol biaya

Tampilan 2 Laporan Biaya Sekolah Berdasar Tingkatan (*Grade-based Cost Report*), 1985-86

	<i>Tingkat 10</i>	<i>Tingkat 11</i>	<i>Tingkat 12</i>	Total
Biaya langsung-Instruksi				
Gaji guru umum	Rp 470,000	Rp 411,250	Rp 293,750	Rp1,175,000
Gaji guru pendidikan khusus	240,000	144,000	96,000	480,000
Gaji pembantu (<i>Aide</i>)	35,100	14,625	8,775	58,500
Gaji guru pengganti	15,080	13,195	9,425	37,700
Perlengkapan belajar dan perpustakaan	34,080	29,820	21,300	85,200
Jasa lain	65,500	81,875	180,125	327,500
Jumlah	Rp 859,760	Rp 694,765	Rp 609,375	Rp2,163,900
Biaya langsung-administrasi				
Gaji administrative	Rp 50,000	Rp 43,750	Rp 31,250	Rp 125,000
Perlengkapan administrative	6,200	5,425	3,875	15,500
Operasi dan peralatan	67,500	108,000	94,500	270,000
Lainnya	3,000	2,625	1,875	7,500
Jumlah	Rp 126,700	Rp 159,800	Rp 131,500	Rp 418,000
Biaya tidak langsung-alokasi kantor pusat				
Komite sekolah	Rp 1,400	Rp1,223	Rp 877	Rp 3,500
Administrasi	17,320	15,126	10,854	43,300
Asuransi jiwa dan kesehatan	54,080	47,230	33,890	135,200
Operasi dan peralatan	2,960	2,585	1,855	7,400
Sewa dan depresiasi	1,400	1,223	877	3,500
Jasa kontrak	880	769	551	2,200
Travel	340	297	213	850
Jumlah	Rp 78,380	Rp 68,453	Rp 49,117	Rp 195,950
Total biaya langsung & tidak langsung	Rp1,064,840	Rp 68,453	Rp 789,992	Rp2,777,850
Jumlah yang dibutuhkan siswa	300	262	188	
Rata-rata biaya per siswa yang terdaftar	Rp 3,550	Rp 3,523	Rp 4,202	

3. *Service-Based System*



Metode *Service-Based System*, yaitu penghitungan berdasar pada level jasa pendidikan yang diterima

Pada langkah pertama penghitungan, biaya sekolah dipisahkan menurut tipe jasa yang tersedia, yaitu:

Atletik dan
Konsultasi

pendidikan umum
(*regular education*)

pendidikan
khusus

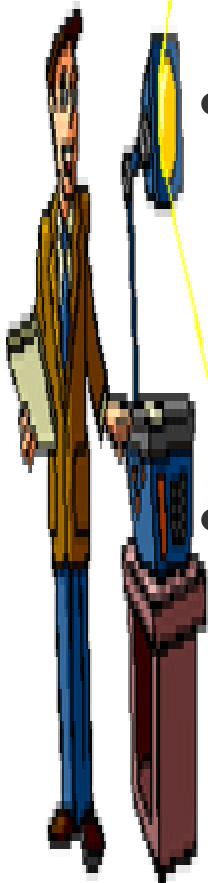


Tampilan 3 *Service-Based Cost Report* (Laporan Biaya berdasar Jasa), 1985-86

	Pendidikan umum	Pendidikan khusus	Atletik	Konsultasi	Total
Biaya langsung-Instruksi					
Gaji guru umum	Rp1,112,300		Rp 62,700		Rp1,175,000
Gaji guru pendidikan khusus		Rp 480,000			480,000
Gaji pembantu (Aide)	15,300	43,200			58,500
Gaji guru pengganti	25,700	12,000			37,700
Perlengkapan belajar dan perpustakaan	60,200	25,000			85,200
Jasa lain	18,200	50,300	204,000	Rp 55,000	327,500
Jumlah	Rp1,231,700	Rp 610,500	Rp266,700	Rp 55,000	Rp2,163,900
Biaya langsung-administrasi					
Gaji administrative	Rp 71,750	Rp 35,266	Rp 15,406	Rp 3,178	Rp 125,000
Perlengkapan administrative	8,825	4,373	1,910	394	14,500
Operasi dan peralatan	153,685	76,175	33,277	6,863	270,000
Lainnya	4,269	2,116	924	191	7,500
Jumlah	Rp 237,927	Rp 117,930	Rp 51,517	Rp 10,626	Rp 418,000
Biaya tidak langsung-alokasi dari kantor pusat					
Komite sekolah	Rp 1,992	Rp 987	Rp 431	Rp 89	Rp 3,500
Administrasi	24,648	12,216	5,337	1,101	43,300
Asuransi jiwa dan kesehatan	76,956	38,144	16,663	3,436	135,200
Operasi dan peralatan	4,212	2,088	912	188	7,400
Sewa dan depresiasi	1,992	987	431	89	3,500
Jasa kontrak	1,252	621	271	56	2,200
Travel	484	240	105	22	850
Jumlah	Rp 111,536	Rp 55,283	Rp 24,150	Rp 4,981	Rp 195,950
Total biaya langsung & tidak langsung	Rp1,581,163	Rp 783,713	Rp 24,150	Rp 4,981	Rp 195,950
Jumlah unit	127,500	1,200	1,500	300	
Biaya per unit	Rp 12.40	Rp 653.09	Rp 280.13	Rp 235.36	

Penutup (1)

- Salah satu kelemahan mendasar dalam Sistem Pendidikan di Indonesia adalah sulitnya memperoleh informasi keuangan sekolah yang standar.
- Anggaran pendidikan, pola subsidi pendidikan, pelaporan pengelolaan keuangan sekolah, pengukuran dan pelaporan kinerja sekolah, *costing* dan *pricing* layanan pendidikan, audit keuangan dan kinerja sekolah merupakan komponen manajemen keuangan pendidikan.
- Pembentukan manajemen keuangan pendidikan di Indonesia harus dimulai dengan menyusun teknik keuangan pendidikan yang komprehensif, dengan standar akuntansi dan keuangan berterima umum.



Penutup (2)

- Dalam sebuah format regulasi manajemen keuangan, para pengelola pendidikan didorong untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia melalui upaya kebijakan maupun teknis pengelolaan sekolah.
- Kualitas pendidikan dapat dicerminkan dengan biaya yang dikeluarkan dan pengendaliannya. Informasi laporan biaya, terutama tipe aktivitas dan *unit cost* yang seharusnya diawasi, membuktikan bahwa kualitas pelayanan dan variasinya amat ditentukan dengan kemampuan pengelolaan keuangan dengan tepat dan akurat.
- Ini berarti sistem biaya sebagai bagian dari manajemen keuangan, merupakan salah satu alat penentu terwujudnya kualitas pendidikan di suatu lembaga pendidikan.



AKUNTANSI PENDIDIKAN



TERIMA KASIH
indra_bastian@yahoo.com

Indra Bastian

